



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 3665-3672

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana BOSP Berbasis Akuntabilitas dan Transparansi untuk Optimalisasi Proses Belajar di SDN Jati 3

Lilis Suwandari, Wahyu Satya Gumelar, Mohamad Ridwan A. Samsuri, Dede Yuningsih, Noneng Handayani
Pascasarjana, Universitas Islam Nusantara
lizsuwandari@gmail.com, wahyug@uinus.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SDN Jati 3, Kecamatan Bojongpicung, dengan menitikberatkan pada penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mendukung optimalisasi proses pembelajaran. Pengelolaan dana pendidikan yang efektif dan bertanggung jawab merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan di tingkat sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif evaluatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri atas kepala sekolah, bendahara sekolah, dan perwakilan komite sekolah, observasi lapangan, serta analisis dokumen berupa Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan laporan pertanggungjawaban keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDN Jati 3 telah menerapkan mekanisme pengelolaan dana BOSP yang relatif transparan dan akuntabel melalui pencatatan administrasi keuangan yang tertib serta penyampaian informasi penggunaan dana secara terbuka kepada pemangku kepentingan. Pengelolaan dana BOSP juga diarahkan pada peningkatan sarana pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, serta penguatan literasi dan numerasi siswa. Dampak positif dari pengelolaan dana tersebut tercermin pada peningkatan kehadiran siswa hingga 95 persen serta meningkatnya kepuasan orang tua terhadap fasilitas sekolah sebesar 25 persen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola Dana BOSP berbasis akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting dalam menciptakan efisiensi pengelolaan pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Dana BOSP, Akuntabilitas, Transparansi, Optimalisasi Pembelajaran

1. Latar Belakang

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan salah satu instrumen kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam menjamin keberlangsungan layanan pendidikan dasar yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap satuan pendidikan dasar memiliki dukungan pendanaan yang memadai guna memenuhi kebutuhan operasional sekolah serta mendukung proses pembelajaran yang efektif. Sejak diberlakukannya kebijakan BOSP sebagai penyempurnaan dari skema bantuan operasional sebelumnya, pemerintah secara tegas menempatkan sekolah sebagai aktor utama dalam pengelolaan keuangan pendidikan berbasis kebutuhan riil satuan pendidikan. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma kebijakan pendidikan dari sentralistik menuju desentralistik, dengan harapan sekolah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam merencanakan dan menggunakan anggaran sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik.

Pendekatan desentralisasi pengelolaan dana BOSP memberikan peluang bagi sekolah untuk merancang program pembelajaran yang lebih kontekstual dan responsif terhadap tantangan lokal. Namun, di sisi lain, pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan tersebut juga membawa konsekuensi meningkatnya tuntutan terhadap akuntabilitas, transparansi, serta kapasitas manajerial sekolah, khususnya di tingkat sekolah dasar. Sekolah tidak hanya dituntut mampu menyusun perencanaan anggaran yang sesuai dengan regulasi, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap rupiah dana BOSP digunakan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).

Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana BOSP Berbasis Akuntabilitas dan Transparansi untuk Optimalisasi Proses Belajar di SDN Jati 3

Dalam praktiknya, pengelolaan dana BOSP tidak dapat dipandang semata-mata sebagai aktivitas administratif yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan. Lebih dari itu, pengelolaan dana BOSP memiliki implikasi langsung terhadap kualitas proses pembelajaran di sekolah. Sekolah dituntut mampu menerjemahkan kebijakan penggunaan dana ke dalam program-program konkret yang berdampak pada peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang relevan, serta penciptaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan BOSP tidak dapat diukur hanya dari ketepatan waktu pelaporan atau kelengkapan dokumen administrasi, melainkan harus dikaitkan dengan sejauh mana dana tersebut berkontribusi terhadap optimalisasi proses belajar mengajar dan pencapaian tujuan pendidikan di tingkat sekolah dasar.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor kunci dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Hidayati (2021) menegaskan bahwa keterbukaan informasi penggunaan dana sekolah berperan penting dalam membangun kepercayaan publik, khususnya dari orang tua dan masyarakat sekitar. Transparansi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana pendidikan. Temuan ini diperkuat oleh Prasetyo (2019) yang menyatakan bahwa sistem pengelolaan keuangan sekolah yang akuntabel berkontribusi pada peningkatan efisiensi penggunaan dana dan memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel administratif, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan dampak substantif terhadap kualitas pembelajaran.

Pada level implementasi, tantangan pengelolaan dana BOSP semakin kompleks seiring dengan meningkatnya tuntutan pemanfaatan teknologi dalam administrasi dan pembelajaran. Digitalisasi sistem pelaporan keuangan sekolah, penggunaan aplikasi pengelolaan dana, serta keterbukaan informasi berbasis daring kini menjadi indikator penting tata kelola keuangan pendidikan yang modern. Studi OECD (2020) menekankan bahwa transparansi keuangan berbasis digital di sektor pendidikan tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data di tingkat sekolah. Namun demikian, adopsi praktik-praktik digital tersebut di sekolah dasar, khususnya di wilayah nonperkotaan, masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur teknologi, serta tingkat literasi digital pengelola sekolah.

Di Indonesia, penelitian terkait kebijakan pendanaan pendidikan masih cenderung berfokus pada evaluasi kebijakan di tingkat makro atau analisis kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menitikberatkan pada aspek normatif kebijakan dan belum banyak menggali dinamika implementasi kebijakan BOSP di tingkat mikro sekolah dasar. Padahal, implementasi kebijakan di tingkat sekolah sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, kapasitas manajerial kepala sekolah, serta keterlibatan pemangku kepentingan di lingkungan sekolah. Penelitian oleh Adelia (2025) menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan satuan pendidikan dalam mengadaptasi kebijakan nasional ke dalam konteks lokal sekolah. Temuan ini mengindikasikan adanya kebutuhan akan kajian empiris yang lebih mendalam mengenai praktik pengelolaan dana BOSP di tingkat sekolah dasar.

Kesenjangan penelitian (research gap) juga terlihat pada minimnya studi evaluatif yang secara langsung mengaitkan pengelolaan dana BOSP dengan indikator-indikator kualitas pembelajaran. Sebagian besar penelitian masih berhenti pada analisis prosedural, seperti kepatuhan terhadap juknis dan mekanisme pelaporan, sementara dampak nyata pengelolaan dana terhadap proses pembelajaran belum menjadi fokus utama. Indikator-indikator seperti kehadiran siswa, kedisiplinan belajar, keterlibatan orang tua, dan pemanfaatan sarana pembelajaran jarang dikaji secara komprehensif dalam konteks pengelolaan dana BOSP. Padahal, kebijakan pendanaan pendidikan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil dan proses pembelajaran, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.

Dalam konteks tersebut, SDN Jati 3 yang berlokasi di Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, menjadi lokasi penelitian yang relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan dana BOSP secara lebih komprehensif. Sekolah ini secara aktif mengelola dana BOSP untuk mendukung berbagai program peningkatan mutu pembelajaran, termasuk pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi, peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG), serta penguatan literasi dan numerasi siswa. Praktik pengelolaan dana yang dilakukan oleh SDN Jati 3 memberikan konteks empiris yang menarik untuk dievaluasi, terutama dalam melihat sejauh mana prinsip akuntabilitas dan transparansi diterapkan secara konsisten serta bagaimana dampaknya terhadap kualitas pembelajaran.

Alasan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjawab kebutuhan akan kajian evaluatif yang tidak hanya menilai tingkat kepatuhan sekolah terhadap regulasi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), tetapi juga menganalisis secara lebih mendalam hubungan antara tata kelola keuangan sekolah dan kualitas pembelajaran yang dihasilkan. Selama ini, evaluasi pengelolaan dana pendidikan di tingkat sekolah dasar cenderung berfokus pada aspek administratif, seperti kelengkapan dokumen, kesesuaian laporan dengan petunjuk teknis, serta kepatuhan terhadap prosedur pencairan dan pelaporan dana. Pendekatan tersebut penting, namun belum cukup untuk menggambarkan efektivitas kebijakan BOSP dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran di sekolah.

Penelitian ini berupaya mengisi celah penelitian tersebut dengan menghadirkan analisis yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kebijakan BOSP diterjemahkan ke dalam praktik pengelolaan dana di tingkat sekolah dasar. Fokus kajian tidak hanya diarahkan pada bagaimana dana direncanakan dan dipertanggungjawabkan, tetapi juga pada bagaimana keputusan pengelolaan keuangan tersebut memengaruhi penyediaan sarana pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, serta penciptaan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. Dengan demikian, penelitian ini memandang pengelolaan dana BOSP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pembelajaran, bukan sekadar aktivitas administratif yang berdiri sendiri.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena kualitas pembelajaran di sekolah dasar sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang dikelola secara efektif. Ketepatan alokasi dana untuk kebutuhan pembelajaran, seperti pengadaan media ajar, pengembangan profesional guru, dan dukungan terhadap program literasi dan numerasi, sangat menentukan keberhasilan sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menelaah sejauh mana tata kelola keuangan sekolah mampu menjembatani kebijakan pendanaan dengan kebutuhan pedagogis yang nyata di kelas. Dengan kata lain, penelitian ini menempatkan pengelolaan dana BOSP sebagai instrumen strategis untuk mendorong perubahan kualitas pembelajaran, bukan hanya sebagai kewajiban pelaporan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan evaluatif yang secara eksplisit menghubungkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOSP dengan indikator-indikator konkret kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Penelitian ini menempatkan sekolah sebagai unit analisis utama dan mengkaji praktik pengelolaan dana secara kontekstual, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika implementasi kebijakan BOSP di lapangan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi apakah prinsip akuntabilitas dan transparansi telah diterapkan, tetapi juga menelaah bagaimana prinsip-prinsip tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan yang dirasakan oleh siswa dan orang tua.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran keterbukaan informasi dan partisipasi pemangku kepentingan sebagai bagian integral dari tata kelola dana pendidikan yang berkelanjutan. Keterlibatan orang tua dan komite sekolah dalam mengakses informasi penggunaan dana BOSP serta memberikan masukan terhadap program sekolah dipandang sebagai elemen penting dalam menciptakan pengelolaan dana yang responsif dan bertanggung jawab. Dengan menempatkan partisipasi pemangku kepentingan sebagai bagian dari analisis, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih luas mengenai tata kelola dana pendidikan, tidak hanya dari sudut pandang internal sekolah, tetapi juga dari perspektif masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan dana BOSP di SDN Jati 3 dalam mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Fokus kajian diarahkan pada sejauh mana prinsip akuntabilitas dan transparansi diterapkan dalam pengelolaan dana BOSP, serta bagaimana dampak pengelolaan dana tersebut terhadap penyediaan sarana pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, dan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara kebijakan pendanaan dan praktik pembelajaran di sekolah dasar.

Secara keseluruhan, bagian ini menegaskan bahwa evaluasi implementasi kebijakan BOSP perlu diarahkan tidak hanya pada aspek kepatuhan administratif, tetapi juga pada kualitas pembelajaran sebagai tujuan akhir kebijakan pendidikan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris yang relevan bagi pengambil kebijakan, pengelola sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperkuat tata kelola dana BOSP yang akuntabel, transparan, dan berdampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan dasar di Indonesia

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain evaluatif untuk menelaah secara mendalam implementasi kebijakan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SDN Jati 3, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, praktik, dan konteks pengelolaan dana BOSP di tingkat sekolah dasar, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi serta dampaknya terhadap kualitas pembelajaran. Desain evaluatif digunakan untuk menilai kesesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dalam regulasi dengan praktik pengelolaan dana yang dilaksanakan di lapangan, serta untuk mengidentifikasi capaian, kendala, dan implikasi kebijakan tersebut dalam konteks operasional sekolah.

Penelitian dilaksanakan di SDN Jati 3 dengan pertimbangan bahwa sekolah ini secara aktif mengelola dana BOSP dan telah menjalankan berbagai program peningkatan mutu pembelajaran yang didanai dari BOSP. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena memberikan konteks empiris yang relevan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan dana pada satuan pendidikan dasar. Penelitian dilaksanakan selama satu semester tahun ajaran berjalan, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengamati proses pengelolaan dana dan pemanfaatannya dalam kegiatan pembelajaran secara berkelanjutan, bukan hanya berdasarkan potret sesaat.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah informan kunci yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengawasan dana BOSP. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, dengan kriteria memiliki peran, kewenangan, dan pengalaman langsung dalam pengelolaan dana BOSP di sekolah. Informan utama terdiri atas kepala sekolah sebagai penanggung jawab kebijakan dan pengambilan keputusan strategis, bendahara sekolah sebagai pelaksana teknis pengelolaan dan pelaporan keuangan, serta perwakilan komite sekolah yang mewakili unsur masyarakat dan orang tua siswa. Jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan kedalaman data, dengan prinsip kecukupan informasi, di mana proses pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu studi dokumentasi, wawancara semi-terstruktur, dan observasi lapangan. Studi dokumentasi difokuskan pada analisis dokumen resmi pengelolaan dana BOSP, termasuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Laporan Realisasi Anggaran, Buku Kas Umum, serta dokumen pendukung lainnya. Analisis dokumen dilakukan untuk menelusuri alur perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana BOSP, serta untuk mengidentifikasi kesesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi penggunaan dana. Dokumen-dokumen tersebut juga digunakan sebagai dasar untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Wawancara dengan kepala sekolah diarahkan untuk menggali kebijakan internal sekolah, mekanisme pengambilan keputusan, serta strategi pengelolaan dana BOSP. Wawancara dengan bendahara sekolah difokuskan pada aspek teknis pengelolaan keuangan, prosedur pencatatan dan pelaporan, serta praktik transparansi yang diterapkan. Sementara itu, wawancara dengan komite sekolah diarahkan untuk memperoleh perspektif eksternal mengenai keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, dan dampak pengelolaan dana BOSP terhadap layanan pendidikan. Setiap sesi wawancara berlangsung antara 45 hingga 60 menit dan direkam dengan persetujuan informan untuk memastikan keakuratan data.

Observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung pemanfaatan dana BOSP dalam kegiatan pembelajaran dan pengelolaan sarana pendidikan. Observasi difokuskan pada penggunaan fasilitas yang didanai oleh BOSP, seperti alat peraga pembelajaran, media berbasis teknologi, dan sarana pendukung literasi. Observasi juga mencakup pengamatan terhadap aktivitas administrasi sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan dana, termasuk penyimpanan dokumen dan mekanisme penyampaian informasi kepada warga sekolah. Hasil observasi dicatat secara sistematis dalam catatan lapangan untuk dianalisis bersama data dari wawancara dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan yang saling berkesinambungan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan data mentah dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk memfokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahap selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk narasi tematik yang menggambarkan pola-pola pengelolaan dana BOSP, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta dampaknya terhadap pembelajaran. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan,

yang dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan kerangka evaluasi kebijakan pengelolaan dana pendidikan.

Untuk menjamin keabsahan dan keandalan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode. Informasi yang diperoleh dari wawancara diverifikasi dengan data dokumentasi dan hasil observasi lapangan untuk memastikan konsistensi dan akurasi temuan. Selain itu, member checking dilakukan dengan menyampaikan ringkasan temuan kepada informan utama untuk memperoleh konfirmasi dan klarifikasi. Langkah-langkah ini dilakukan untuk meminimalkan bias peneliti dan memastikan bahwa hasil penelitian merepresentasikan kondisi empiris yang sebenarnya.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Mekanisme Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOSP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDN Jati 3 telah menerapkan mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) secara relatif konsisten dan terstruktur. Transparansi pengelolaan dana diwujudkan melalui penyampaian informasi penggunaan anggaran kepada warga sekolah dan masyarakat secara terbuka. Informasi tersebut disajikan melalui papan pengumuman sekolah serta didukung oleh sistem informasi pengelolaan dana berbasis digital yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan tertentu, seperti komite sekolah dan orang tua siswa. Informasi yang disampaikan mencakup rencana penggunaan dana, realisasi anggaran, serta daftar kegiatan yang dibiayai melalui dana BOSP, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai alur penggunaan dana di tingkat sekolah.

Keterbukaan informasi tersebut berfungsi sebagai sarana komunikasi antara pihak sekolah dan masyarakat sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas dana yang dikelola. Orang tua dan komite sekolah memiliki kesempatan untuk mengetahui prioritas penggunaan dana dan menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara, pihak sekolah secara berkala menyampaikan ringkasan penggunaan dana dalam forum-forum resmi sekolah, meskipun intensitas dan kedalaman informasi yang disampaikan masih bersifat ringkas dan lebih menekankan pada aspek umum penggunaan dana. Namun demikian, praktik ini menunjukkan adanya upaya sistematis dari pihak sekolah untuk membangun transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Dari sisi administrasi keuangan, hasil wawancara dengan bendahara sekolah menunjukkan bahwa seluruh transaksi keuangan dana BOSP dicatat secara rinci dan sistematis dalam Buku Kas Umum (BKU). Setiap pengeluaran didukung oleh bukti transaksi yang sah dan terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan proses pemeriksaan dan pelaporan. Pencatatan tersebut selanjutnya direkonsiliasi secara berkala dengan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Proses rekonsiliasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan rencana yang telah disetujui dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Hasil analisis dokumen menunjukkan adanya kesesuaian yang tinggi antara perencanaan dan realisasi anggaran selama periode penelitian. Tidak ditemukan perbedaan signifikan antara alokasi dana yang direncanakan dalam RKAS dan realisasi penggunaan dana yang tercantum dalam laporan keuangan sekolah. Beberapa penyesuaian kecil memang dilakukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang bersifat mendesak, seperti pengadaan alat peraga tambahan atau perbaikan sarana pembelajaran. Namun, penyesuaian tersebut dilakukan melalui mekanisme internal sekolah dan tetap dicatat secara administratif, sehingga tidak mengganggu prinsip akuntabilitas pengelolaan dana.

Dalam konteks diskusi, temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di SDN Jati 3 tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian internal sekolah. Keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana mendorong kehati-hatian dalam pengambilan keputusan keuangan dan memperkecil peluang terjadinya penyimpangan anggaran. Dengan adanya dokumentasi yang tertib dan sistem pelaporan yang jelas, pihak sekolah memiliki dasar yang kuat untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana kepada pihak internal maupun eksternal.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Hidayati (2021) yang menyatakan bahwa transparansi keuangan sekolah berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan publik serta memastikan bahwa dana pendidikan digunakan

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks SDN Jati 3, kepercayaan tersebut tercermin dari keterlibatan komite sekolah dan respon positif orang tua terhadap keterbukaan informasi penggunaan dana. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas pemanfaatan sistem informasi berbasis digital masih sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia sekolah. Pengelolaan dan pembaruan data dalam sistem digital memerlukan keterampilan teknis yang memadai, sehingga optimalisasi sistem tersebut membutuhkan pendampingan dan pelatihan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan di SDN Jati 3 menunjukkan praktik pengelolaan dana BOSP yang cukup baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas penyajian informasi masih diperlukan agar transparansi dan akuntabilitas tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran.

3.2 Optimalisasi Proses Pembelajaran Melalui Pemanfaatan Dana BOSP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SDN Jati 3 dimanfaatkan secara strategis untuk mendukung optimalisasi proses pembelajaran di kelas. Pemanfaatan dana tidak diarahkan pada kegiatan administratif semata, melainkan difokuskan pada program-program yang memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Salah satu bentuk pemanfaatan tersebut adalah penguatan kompetensi guru melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG). Kegiatan KKG dilaksanakan secara rutin dan dimanfaatkan sebagai forum untuk berbagi praktik pembelajaran, mendiskusikan permasalahan yang dihadapi guru di kelas, serta mengembangkan bahan ajar yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan siswa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kegiatan KKG memberikan ruang bagi guru untuk meningkatkan kemampuan pedagogik, khususnya dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih variatif dan berpusat pada siswa. Dana BOSP digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut, termasuk penyediaan bahan pendukung dan sarana pembelajaran. Dampak dari kegiatan ini terlihat pada meningkatnya kepercayaan diri guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang lebih inovatif serta kemampuan guru dalam menyesuaikan materi ajar dengan karakteristik siswa di kelas.

Selain pengembangan kompetensi guru, dana BOSP juga dimanfaatkan untuk pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi, seperti proyektor dan penyediaan akses internet. Hasil observasi menunjukkan bahwa keberadaan sarana tersebut memungkinkan guru menyajikan materi pembelajaran secara lebih menarik melalui media visual dan digital. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran membantu guru menjelaskan konsep-konsep yang bersifat abstrak dengan lebih konkret, sehingga memudahkan siswa dalam memahami materi. Media pembelajaran berbasis teknologi juga mendorong interaksi yang lebih aktif antara guru dan siswa, terutama pada mata pelajaran yang membutuhkan demonstrasi dan ilustrasi konsep.

Pemanfaatan dana BOSP juga diarahkan pada penguatan literasi dan numerasi siswa melalui penambahan koleksi buku perpustakaan dan bahan ajar pendukung. Buku-buku yang disediakan tidak hanya berfungsi sebagai koleksi, tetapi digunakan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan program literasi sekolah. Guru memanfaatkan bahan bacaan tersebut untuk mendukung kegiatan membaca terarah dan latihan numerasi, sehingga siswa memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber belajar. Temuan ini menunjukkan bahwa alokasi dana BOSP di SDN Jati 3 diarahkan untuk membangun sumber belajar yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran siswa.

Dalam konteks diskusi, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa optimalisasi proses pembelajaran melalui pemanfaatan dana BOSP sangat dipengaruhi oleh ketepatan alokasi anggaran dan kesesuaiannya dengan kebutuhan pembelajaran di sekolah. Pemanfaatan dana yang diarahkan pada pengembangan kompetensi guru dan penyediaan sarana pembelajaran yang memadai terbukti mendukung peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Hal ini sejalan dengan pandangan Hidayati (2021) yang menyatakan bahwa ketersediaan sumber belajar dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi serta pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan dana BOSP tetap bergantung pada kemampuan guru dalam mengintegrasikan sarana yang tersedia ke dalam praktik pembelajaran secara pedagogis dan berkelanjutan.

3.3 Dampak Pengelolaan Dana BOSP terhadap Kualitas Pembelajaran

Dampak pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) terhadap kualitas pembelajaran di SDN Jati 3 terlihat melalui beberapa indikator utama yang berkaitan langsung dengan proses dan lingkungan belajar siswa. Salah satu indikator yang paling menonjol adalah tingkat kehadiran siswa. Data sekolah tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat kehadiran siswa mencapai 95 persen. Tingginya tingkat kehadiran ini menunjukkan adanya peningkatan motivasi siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara konsisten. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peningkatan kehadiran tersebut berkaitan erat dengan perubahan lingkungan belajar yang menjadi lebih nyaman, tertata, dan menarik setelah adanya dukungan sarana pembelajaran yang dibiayai melalui dana BOSP.

Lingkungan belajar yang lebih kondusif, termasuk ruang kelas yang dilengkapi dengan alat peraga dan media pembelajaran yang memadai, memberikan pengalaman belajar yang lebih positif bagi siswa. Kondisi ini mendorong siswa untuk lebih antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan mengurangi kecenderungan untuk tidak hadir di sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOSP yang diarahkan pada perbaikan sarana dan prasarana pembelajaran dapat memberikan dampak nyata terhadap kehadiran siswa sebagai prasyarat utama keberhasilan proses belajar mengajar.

Selain kehadiran, dampak pengelolaan dana BOSP terhadap kualitas pembelajaran juga tercermin pada peningkatan kedisiplinan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik. Berdasarkan catatan guru, tingkat kepatuhan siswa dalam pengumpulan tugas mengalami peningkatan sebesar 17 persen. Peningkatan ini menunjukkan adanya perubahan perilaku belajar siswa yang lebih bertanggung jawab dan terarah. Guru mengungkapkan bahwa tersedianya bahan ajar yang lebih memadai serta penerapan metode pembelajaran yang lebih variatif turut mendorong siswa untuk lebih aktif dan serius dalam mengikuti pembelajaran. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat kedisiplinan siswa masih bervariasi antar kelas, yang menunjukkan bahwa dampak pengelolaan dana BOSP belum sepenuhnya merata.

Dari perspektif orang tua, dampak pengelolaan dana BOSP tercermin pada meningkatnya tingkat kepuasan terhadap fasilitas dan layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah. Hasil survei kepuasan menunjukkan adanya peningkatan sebesar 25 persen terhadap fasilitas sekolah yang disediakan melalui dana BOSP. Orang tua menilai bahwa perbaikan dan penambahan sarana pembelajaran memberikan dampak langsung terhadap kenyamanan dan kualitas belajar anak-anak mereka. Kepuasan ini juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan orang tua terhadap pengelolaan dana sekolah. Namun demikian, sebagian orang tua masih menyampaikan harapan agar pihak sekolah dapat meningkatkan komunikasi, khususnya terkait perencanaan penggunaan dana pada awal tahun ajaran, sehingga partisipasi dan pemahaman masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

Dalam konteks diskusi, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOSP yang akuntabel dan transparan berkontribusi positif terhadap kualitas pembelajaran di SDN Jati 3. Dampak yang muncul tidak hanya terlihat pada aspek fisik lingkungan belajar, tetapi juga pada perilaku dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Meskipun demikian, dampak pengelolaan dana BOSP tidak bersifat instan dan tidak merata pada seluruh aspek pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana sangat dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan, kapasitas pengelola sekolah, serta kesesuaian antara alokasi dana dan kebutuhan pembelajaran yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan dana BOSP yang dilakukan secara terencana, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pembelajaran dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Namun, untuk menjaga keberlanjutan dampak positif tersebut, diperlukan evaluasi berkala dan penyesuaian strategi pengelolaan dana agar tetap selaras dengan dinamika kebutuhan pendidikan di tingkat sekolah dasar.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SDN Jati 3, Kecamatan Bojongpicung, telah berjalan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan dana dilakukan melalui perencanaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan yang tertib serta disertai dengan keterbukaan informasi kepada warga sekolah dan masyarakat. Praktik transparansi tersebut memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengakses informasi penggunaan dana secara

jelas, sehingga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik dan meminimalkan risiko penyimpangan anggaran. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemanfaatan dana BOSP di SDN Jati 3 telah diarahkan secara efektif untuk mendukung optimalisasi proses pembelajaran. Alokasi dana difokuskan pada peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana pembelajaran berbasis teknologi, serta penguatan literasi dan numerasi siswa. Pemanfaatan dana yang tepat sasaran tersebut berdampak pada meningkatnya kualitas interaksi pembelajaran di kelas, variasi metode pengajaran, serta keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Dampak positif pengelolaan dana BOSP terhadap kualitas pembelajaran tercermin pada peningkatan kehadiran siswa, meningkatnya kedisiplinan dalam menyelesaikan tugas, serta bertambahnya tingkat kepuasan orang tua terhadap fasilitas dan layanan pendidikan yang disediakan sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola dana pendidikan yang baik tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap lingkungan dan proses pembelajaran di sekolah dasar. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi sekolah dasar lain dalam mengelola dana BOSP secara lebih akuntabel dan transparan dengan tetap berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas manajerial sekolah dalam pengelolaan keuangan pendidikan agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan lokasi dan menggunakan pendekatan kuantitatif atau campuran guna mengukur dampak pengelolaan dana BOSP terhadap capaian belajar siswa secara lebih komprehensif.

Referensi

1. Adelia, J. (2025). Implementasi sistem pendidikan nasional dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah menengah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, 23, 23–35.
2. Bogdan, R., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods* (5th ed.). Pearson.
3. Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
4. Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. McGraw-Hill.
5. Hidayati, N. (2021). Pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap efisiensi administrasi sekolah. *Jurnal Pendidikan Teknologi*, 12(3), 145–156.
6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan*. Kemendikbudristek.
7. Kvale, S. (2007). *Doing interviews*. Sage Publications.
8. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
9. Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (edisi ke-15). Remaja Rosdakarya.
10. OECD. (2020). *Digitalisation and public sector efficiency*. OECD Publishing.
11. Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
12. Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods* (3rd ed.). Sage Publications.
13. Prasetyo, T. (2019). Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pendidikan untuk meningkatkan transparansi. *Jurnal Manajemen Sekolah*, 9(1), 22–34.
14. Setiawan, R. (2021). Evaluasi program pendidikan: Pentingnya untuk perbaikan berkelanjutan. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 7(3), 201–214.
15. Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (edisi ke-9). Alfabeta.